OPTIMALISASI SISTEM INFORMASI MANAJEMEN DAERAH (SIMDA) DALAM PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DI KANTOR KELURAHAN KAYUMERAH KECAMATAN LIMBOTO KABUPATEN GORONTALO

ARTIKEL JURNA

SINCE B. TUNA
NIM. D02419041

PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PUBLIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH GORONTALO
GORONTALO
2023

OPTIMALISASI SISTEM INFORMASI MANAJEMEN DAERAH (SIMDA) DALAM PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DI KANTOR KELURAHAN KAYUMERAH KECAMATAN LIMBOTO KABUPATEN GORONTALO

Since B. Tuna[1], Robin Pakudu[2], Franky Djafar[3]
[1,23]Program Studi Administrasi Publik. Fakultas Ilmu Sosial. Universitas Muhammadiyah Gorontalo. 2023
Email: since.tuna@gmail.com

ABSTRACT

This study aims to find out how the Regional Management Information System (SIMDA) in optimizing Financial Management at the Kayumerah Village Office, Limboto District, Gorontalo Regency. The research method used is a qualitative approach with a descriptive type of research. The results of the research obtained that the Optimization of Regional Management Information Systems (SIMDA) in Financial Management at the Kayumerah Village Office, Limboto District, Gorontalo Regency, were found not to be optimally usable. Where when accessing is often hampered by the use of the internet network which is simultaneously used by the public. In addition, when accessing the Regional Finance Agency, it also experienced obstacles because it coincided with the use of OPD and from other Kelurahan/Village Governments. Another thing is also related to human resources owned by the Kayumerah Village Government who do not have the skills or ability to improve if the system experiences human error. Then related to financial management using SIMDA has been good, where if referring to studies related to financial management functions, namely: 1) Financial and Budget Planning (Budgeting), 2) Control (Controling), 3) Auditing (Auditing), and 4) Reporting (Reporting) has gone well. However, this application on other factors can be considered not optimal to be maximized.

Keywords: *Optimization, Financial Management, SIMDA*

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) dalam mengoptimalkan Pengelolaan Keuangan di Kantor Kelurahan Kayumerah Kecamatan Limboto Kabupaten Gorontalo. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Hasil penelitian yang didapatkan bahwa Optimalisasi Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) dalam Pengelolaan Keuangan di Kantor Kelurahan Kayumerah Kecamatan Limboto Kabupaten Gorontalo didapatkan belum secara optimal dapat digunakan. Dimana jika pada saat melakukan akses sering terhambat pada pemakaian jaringan internet yang bersamaan digunakan oleh masyarakat. Selain itu pada saat melakukan akses ke Badan Keuangan Daerah juga mengalami hambatan karena bersamaan dengan penggunaan dari OPD maupun dari Pemerintah Kelurahan/Desa yang lain. Hal lain juga terkait dengan sumber daya manusia yang dimiliki oleh Pemerintah Kelurahan Kayumerah yang belum memiliki skil atau kemampuan memperbaiki jika sistem mengalami *human error.* Kemudian terkait dengan pengelolaan keuangan dengan menggunakan SIMDA telah baik, dimana jika merujuk pada kajian terkait dengan fungsi-fungsi pengelolaan keuangan, yaitu: 1) Perencanaan Keuangan dan Anggaran (*Budgeting*), 2) Pengendalian (*Controling*), 3) Pemeriksaan (*Auditing*), dan 4) Pelaporan (*Reporting*) telah berjalan dengan baik. Namun demikian aplikasi ini pada faktor lain dapat dinilai belum optimal mampu dimaksimalkan

Kata Kunci: Optimalisasi, Pengelolaan Keuangan, SIMDA

PENDAHULUAN

Sejak diberlakukannya otonomi daerah di Indonesia, pemerintah daerah merupakan organisasi sektor publik yang diberi kewenangan oleh pemerintah pusat untuk mengatur pemerintahannya sendiri. Kewenangan pemerintah daerah dalam pelaksanaan otonomi daerah diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang pemerintah daerah yang kemudian disempurnakan ke dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, sebagai berikut: "…Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundangan-undangan…". Undang-Undang tersebut memberikan kebebasan kepada pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangga daerahnya sendiri, menetapkan kebijaksanaan sendiri serta melakukan pembiayaan dan pertanggungjawaban keuangan sendiri. Kewenangan yang luas, utuh dan bulat pada akhirnya harus dipertanggungjawabkan kepada pemberi wewenang dan masyarakat. Oleh karena itu, pemerintah beserta seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) selaku Pengguna Anggaran (PA) diwajibkan untuk menyusun laporan keuangan sebagai bentuk pertanggungjawaban pengelolaan keuangan.

System Informasi Keuangan Daerah adalah suatu system yang mendokumentasikan, mengadmistrasikan, serta mengelolah data pengelolaan keuangan daerah dan data terkait lainnya menjadi informasi yang disajikan kepada masyarakat dan sebagai bahan pengambilan keputusan dalam rangka perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan pertanggungjawaban pemerintah daerah. Informasi keuangan daerah adalah segala informasi yang berkaitan dengan keuangan daerah yang diperlukan dlaam rangka penyelenggaraan system informasi keuangan daerah. Program SIMDA adalah aplikasi yang dikembangkan oleh BPKP untuk membantu pemerintah daerah dalam melaksanakan pengelolaan keuangan daerah. Sesuai dengan peraturan perundangundangan, pemerintah daerah wajib menyusun laporan keuangan untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan daerah. Aplikasi system informasi manajemen daerah merupakan program aplikasi komputer yang terintegritas dan dapat membantu proses administrasi pemerintah daerah dari tingkat provinsi, kabupaten/kota, sampai tingkat kecamatan dan kelurahan. SIMDA terdiri dari 26 aplikasi terpisah yang di distribusikan di setiap SKPD dengan system database terintegrasi, sehingga outputnya dapat dipergunakan oleh pimpinan daerah untuk membantu proses pengambilan keputusan. Disisi lain pihak legislative dapat menggunakannya untuk melakukan monitoring terhadap kinerja pemerintah daerah. SIMDA merupakan salah satu upaya dalam rangka memenuhi kebutuhan informasi secara cepat, tepat, lengkap, 4 akurat, dan terpadu untuk menunjang proses administrasi pemerintahan, pelayanan masyarakat, dan memfasilitasi partisipasi dan dialog publik.

Fenomena yang terjadi dalam perkembangan sektor publik di Indonesia dewasa ini adalah menguatnya tuntutan akuntabilitas atas lembaga-lembaga publik, baik dipusat maupun daerah. Akuntabilitas merupakan salah satu aspek penting dalam *good governance*. Konsep ini bukan merupakan hal baru di Indonesia. Karena hampir seluruh instansi maupun lembaga-lembaga pemerintah menekankan konsep akuntabilitas dalam menjalankan fungsi administratif dan kepemerintahnnya. Akuntabilitas dapat diartikan sebagai bentuk kewajiban mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya, melalui media pertanggungjawaban yang dilaksanakan

secara periodik. Adanya tuntutan yang semakin besar terhadap pelaksanaan akuntabilitas, khusunya dalam akuntablitas keuangan, menimbulkan implikasi bagi manajemen pada instansi pemerintah untuk memberikan informasi salah satunya adalah informasi dalam laporan keuangan. Pembuatan laporan keuangan adalah suatu kebutuhan yang merupakan syarat pendukung adanya akuntabilitas berupa pertanggungjawaban pemerintah atas aktivitas pengelolaan sumber daya keuangan yang memenuhi prinsip tepat waktu dan disusun mengikuti Standar Akuntansi Pemerintahan.

Sebelum terjadinya reformasi keuangan di Indonesia, laporan keuangan yang dihasilkan hanya berupa Perhitungan Anggaran Negara (PAN) dengan menggunakan sistem pencatatan tunggal. Selain itu juga belum ditetapkannya Standar Akuntansi Pemerintahan. Hal ini mengakibatkan pengolahan data belum terintegrasi secara memadai dan penyusunan laporan keuangan masih bersifat sentralisasi. Reformasi manajemen keuangan negara ditandai dengan munculnya tiga paket Undang-Undang, yakni UU Nomor 17 Tahun 2002, UU Nomor 1 Tahun 2004, dan UU Nomor 15 Tahun 2004. Dengan munculnya tiga paket UU tersebut, Menteri Keuangan menyelenggarakan akuntansi dan pelaporan keuangan, selaku pengelola fiskal.

Akuntabilitas meliputi berbagi dimensi, antara lain akuntabilitas hukum, akuntabilitas manajerial, akuntabilitas program, akuntabilitas kebijakan, dan akuntabilitas finansial (keuangan). Terkait dengan akuntabilita keuangan, sesuai Pasal I UU Nomor 15 tahun 2004 dijelaskan bahwa Tanggung Jawab Keuangan Negara merupakan kewajiban Pemerintah untuk melaksanakan pengelolaan keuangan negara secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efesien, ekonomis, efektif, dan transparan dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan. Lebih jauh, Lembaga Administrasi Negara (LAN) RI seperti yang dikutip Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP)menjelaskan tentang akuntabilitas keuangan merupakan pertanggung jawaban mengenai integritas keuangan, pengungkapan dan ketaatan terhadap peraturan perundangan.

Sasaran pertanggung jawaban ini adalah laporan keuangan yang disajikan dan peraturan perundangan yang berlaku yang mencakup penerimaan, penyimpanan, dan pengeluaran uang oleh instansi pemerintah. Sejak diberlakukakannya otonomi daerah di Indonesia, pemerintah daerah merupakan organisasi sektor publik yang diberi kewenangan oleh pemerintah pusat untuk mengatur pemerintahannya sendiri. Kewenangan pemerintah daerah dalam pelaksanaan otonomi daerah diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.

Dalam undang-undang tersebut, memberikan kebebasan kepada pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangga daerahnya sendiri, menetapkan kebijaksanaan sendiri serta melakukan pembiayaan dan pertanggungjawaban keuangan sendiri. Kewenangan yang luas, utuh dan bulat pada akhirnya harus dipertanggungjawabkan kepada pemberi wewenang dan masyarakat. Administrasi diartikan sebagai kegiatan menyusun informasi secara sistematis dan mencatat secara tertulis segala kegiatan yang diperlukan untuk memperoleh gambaran umum tentang informasi itu secara utuh dan hubungannya satu sama lain, dengan tujuan untuk memperoleh gambaran umum tentang informasi itu secara utuh dan menyeluruh dalam hubungannya satu sama lain (Saputro, 2020; Syukur & Setiawan, 2021). Akibatnya, administrasi didefinisikan sebagai tindakan menulis, mentransfer, dan melestarikan informasi (Prastiawan, et al. 2019). Secara umum, administrasi memerlukan mendukung, melayani, membimbing, dan mengelola semua kegiatan organisasi untuk

mencapai tujuan secara tepat waktu dan efisien (Purnomo, 2015).

Menurut Purba et al., (2021:114) pengelolaan keuangan atau manajemen keuangan adalah perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian kegiatan keuangan seperti pengadaan dan pemanfaatan dana usaha. Sedangkan menurut Anwar (2019:5) manajemen keuangan adalah suatu disiplin ilmu yang mempelajari tentang pengelolaan keuangan perusahaan baik dari sisi pencarian sumber dana, pengalokasian dana, maupun pembagian hasil keuntungan perusahaan. Secara harfiah pengelolaan keuangan (manajemen keuangan) berasal dari kata manajemen yang memiliki arti mengelola dan keuangan yang berarti hal-hal yang berhubungan dengan uang seperti pembiayaan, investasi dan modal. Sehingga jika disimpulkan manajemen keuangan dapat diartikan sebagai seluruh aktivitas yang berhubungan dengan bagaimana mengelola keuangan yang dimulai memperoleh sumber pendanaan, menggunakan dana sebaik mungkin hingga mengalokasikan dana pada sumber-sumber investasi untuk mencapai tujuan perusahaan (Armereo et al, 2020:1).

Manajemen keuangan menurut para ahli dalam Irfani (2020:11) manajemen keuangan dapat didefinisikan sebagai aktivitas pengelolaan keuangan perusahaan yang berbubungan dengan upaya mencari dan menggunakan dana secara efisien dan efektif untuk mewujudkan tujuan perusahaan Jatmiko (2017:1) mengungkapkan ruang lingkup pengelolaan keuangan (manajemen keuangan) berkaitan dengan perencanaan, pengarahan, pemantauan, pengorganisasiaan dan pengendalian sumber daya keuangan suatu perusahaan. Sedangkan menurut Wijaya (2017:2) ruang lingkup dari manajemen keuangan berkaitan dengan pengelolaan keuangan seperti anggaran, perencanaan keuangan, kas, kredit, analisis investasi, serta usaha memperoleh dana. Menurut Anwar (2019) manajemen keuangan adalah suatu disiplin ilmu yang mempelajari tentang pengelolaan keuangan perusahaan baik dari sisi pencarian sumber dana, pengalokasian dana, maupun pembagian hasil keuntungan perusahaan.

2. Fungsi Pengelolaan Keuangan

Nurdiansyah dan Rahman (2019:74) menyatakan fungsi-fungsi pengelolaan keuangan (manajemen keuangan) tersebut, adalah:

a. Perencanaan Keuangan dan Anggaran (*Budgeting*)
   Segala kegiatan perusahaan yang berkaitan dengan penggunaan anggaran dana perusahaan yang digunakan unttuk segala aktivitas dan kepentingan perusahaan. Dengan perencanaan dan pertimbangan yang matang menaksimalkan keuntungan dan meminimalisasi anggaran yang sia-sia tanpa hasil.
b. Pengendalian (*Controling*)
   Berhubungan dengan tindak pengavwasan dalam segala aktivitas dalam manajemen keuangan, baik dalam penyalurannya maupun pada pembukuannya yang untuk selanjornya dilakukan evaluasi keuangan yang bisa dijadikan acuan untuk melaksanakan kegiatan perusahaan selanjurnya.
c. Pemeriksaan (*Auditing*)
   Segala pemeriksaan internal yang dilakukan demi segala bentuk kegiatan yang berhubungan dengan manajemen keuangan memang telah sesuai dengan kaidah standar akuntansi dan tidak terjadi penyimpangan.
d. Pelaporan (*Reporting*)
   Dengan adanya manajemen keuangan, maka setiap tahunnya akan ada pelaporan keuangan yang berguna untuk menganalisis rasio laporan laba dan rugi perusahaan.

Berkaitan dengan Optimalisasi Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) dalam pengelolaan keuangan,

telah ada penelitian-penelitian sebelumnya. Misalnya penelitian yang dilakukan oleh Lumintang D. Natalia, 2015. Analisis Penerapan Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) Keuangan pada BPK-BMD Pemerintah kota Manado. Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh gambaran mengenai penerapan SIMDA Keuangan pada Badan pengelola Keuangan dan Barang Milik Daerah (BPK- BMD) pemerintah kota Manado, serta mengetahui faktor-faktor dan nilai-nilai pendukung yang dimilik ioleh BPK-BMD kota manado sehingga mampu menerapkan SIMDA keuangan, serta kualitas informasi yang dihasilkan dari penerapannya. Hasil dari penelitian menunjukan bahwa secara umum pegawai BPK-BMD Manado sudah memahami makna SIMDA Keuangan serta gambaran pelaksanaannya yang berkaitan dengan input dan output datanya, faktor-faktor yang dimiliki untuk mendukung pelaksanaan penerapan SIMDA Keuangan yaitu komunikasi, Sumber daya manusia, sikap/disposisi dan struktur birokrasi.

Irmayani Natsir, Ansyarif Khalid, dan Samsul Rizal. 2017. Analisis Penerapan Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) Keuangan pada Pemerintah Daerah Kabupaten Gowa. Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh gambaran mengenai penerapan SIMDA keuangan pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Kabupaten Gowa, serta mengetahui faktor-faktor pendukung yang dimiliki oleh BPKD Gowa sehingga mampu menerapkan SIMDA keuangan, serta kualitas informasi yang dihasilkan dari penerapannya. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa secara umum pegawai BPKD Gowa sudah memahami makna SIMDA keuangan serta gambaran pelaksanaannya yang berkaitan dengan input dan output datanya. Faktor-faktor yang dimiliki untuk mendukung pelaksanaan penerapan SIMDA keuangan yaitu komunikasi, sumber daya manusia, sikap/disposisi dan struktur birokrasi, adapun kualitas informasi yang dihasilkan dari penerapan SIMDA Keuangan yaitu andal, tepat waktu serta relevan.

Asep Deni, Ari Riswanto (2019). Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan KPT Mahasiswa. Akuntabilitas pengelolaan keuangan pada usaha mikro kecil menengah harus dilakukan guna melihat sejauh mana penerapan pedoman akuntabilitas Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG) pada lembaga yang menggunakan laporan keuangan. Penelitian ini dilakukan pada 4 Koperasi Perguruan Tinggi (KPT/ Koperasi mahasiswa) dengan metode deskriptif kualitatif melalui wawancara untuk memperoleh data primer, adapun profil dan laporan perusahaan digunakan sebagai data sekunder. Hasil penelitian menunjukan bahwa sebagian besar unit KPT telah menerapkan akuntabilitas dan masing-masing unit usaha memiliki keragaman dalam melakukan penyusunan laporan keuangan.

Observasi yang dilakukan oleh penulis di Kantor Kelurahan Kayumerah terkait pengelolaan keuangan yang berbasis SIMDA ini dalam pelaksanaannya masih ditemukan beberapa kendala yang dihadapi dalam menerapkan aplikasi SIMDA, baik itu dari segi fisik (sistem) maupun dari segi non fisik (SDM). Dilihat dari segi fisik, kendala yang masih dihadapi dalam penerapan SIMDA ialah kapasitas jaringan internet yang tersedia Kantor Kelurahan Kayumerah. Meskipun kapasitas bandwith untuk akses di Badan Keuangan telah ditingkatkan tiap tahun, namun di Kantor Kelurahan Kayumerah belum bisa mengikuti kebutuhan minimal kapasitas koneksinya. Hal ini tentunya tergantung dari faktor yakni kualitas jaringan koneksi (baik hardware maupun kapasitas bandwith yang disewa), maupun perilaku pengguna sarana konektivitas itu sendiri. Apabila koneksi internet di dikhususkan untuk tersambung ke server SIMDA di Badan Keuangan Daerah, mungkin bisa lancar. Namun apabila disaat yang bersamaan digunakan untuk terhubung dan berselancar di dunia maya, bisa

dipastikan akses ke server akan terganggu.

Selanjutnya dilihat dari segi non fisik (SDM) kendala yang dihadapi ialah kualitas dan klasifikasi kompetensi yang dimiliki oleh pemakai sistem. Hingga saat ini, operator-operator SIMDA Kantor Kelurahan Kayumerah masih banyak yang belum memiliki kompetensi yang sesuai, hal ini dikarenakan oleh latar pendidikan yang bukan dari programmer (IT), sehingga yang terjadi penggunaan sistem ini tidak berlangsung secara optimal dan juga tingkat kemalasan yang masih tinggi dan tidak mau belajar, karena untuk SIMDA sendiri seringkali mengalami perubahan-perubahan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Selain itu juga dengan hadirnya aplikasi SIMDA Keuangan ini membuat para pengguna terkesan meremehkan dalam artian mengampangkan suatu pekerjaan, yang akhirnya akan berdampak pada hasil dari pekerjaan yang tidak maksimal, karena input data dilakukan dalam waktu singkat dan tergesa-gesa yang mengakibatkan integritas dan validitas data masih diragukan kebenarannya.

METODE PENELITIAN

Berdasarkan pertanyaan penelitian tersebut di atas, penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan jenis penelitian ini bersifat deskriptif. Penelitian deskriptif ini membahas, menganalisis dan mengolah data untuk mendapatkan data yang sesuai dengan masalah yang ada dalam penelitian, dengan mengamati aspek-aspek tertentu secara lebih rinci, untuk mengeksplorasi perbedaan antara dua variabel. hubungan yang mendalam dengan alam. Berdasarkan teori yang diteliti dapat diambil kesimpulan dari data tersebut (Sugiyono, 2013;13).

Sumber data dalam penelitian terbagi atas sumber data primer dan data sekunder.

1. Sumber data primer ini dilakukan dengan mengumpulkan melalui hasil wawancara langsung dengan pihak yang menjadi objek penelitian. Adapun informan dalam penelitian ini diantaranya adalah;
   a. Kepala Kelurahan: 1 orang
   b. Sekretaris Kelurahan: 1 orang
   c. Kepala Seksi: 2 orang
   d. Aparat Kelurahan: 3 orang
   e. Masyarakat: 4 orang

   sehingga jumlah keseluruhan informan dalam penelitian ini adalah 11 orang
2. Sumber data sekunder adalah pengumpulan data yang dilakukan dengan mengumpulkan dokumen-dokumen yang relevan dengan penelitian. Dalam data sekunder ini, peneliti mengumpulkan data melalui foto, dan data-data terkait penelitian

Adapun prosedur pengumpulan data dalam penelitian ini meliputi; **Observasi, Wawancara, dan Dokumentasi.** Salah satu cara yang digunakan oleh peneliti dalam pengujian kredibilitas data adalah dengan triangulasi. Menurut Sugiyono (2013:125) Triangulasi diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara, dan berbagai waktu.

Dalam penelitian ini, peneliti akan menggunakan beberapa tahap penelitian yaitu:

1. Tahap Orientasi; Dilakukan untuk memperoleh gambaran yang lengkap dan jelas tentang masalah yang dikaji, kegiatan ini seperti mengadakan obsevasi dan mempelajari dokumen yang relevan. Pada tahap ini akan dikumpulkan data seluas-luasnya dan ditentukan hal-hal yang paling menonjol untuk diteliti.
2. Tahap Eksplorasi Terpusat; yaitu pengumpulan data yang lebih terarah pada fokus penelitian. Dimana menganalisis informasi- informasi yang berhasil dikumpulkan pada tahap pertama, dan atas dasar analisis tersebut dibuat sketsa wawancara dan obsevasi yang lebih terstruktur.
3. Menetapkan Instrumen; Dalam penelitian terdapat instrumen utama yaitu peneliti dengan kata lain manusia sebagai instrumen, karena manusia sebagai instrumen memiliki keuntungan sebagai responsif dan

tanggap terhadap masalah-masalah yang terjadi disekitarnya.

4. Tahap Pengecekan data; Peneliti akan mengecek kembali kredibilitas informasi-informasi yang telah berhasil dikumpulkan dan pengecekan ditujukan kepada pemberi informasi tersebut. Pada tahapan ini dapat dilihat konsistensi informasi dan dapat dihindari penafsiran yang keliru terhadap informasi yang diberikan.
5. Melaksanakan penelitian; Peneliti akan melaksanakan penelitian sesuai prosedur dan mekanisme yang telah ditetapkan.
6. Mengelola dan menganalisis data; Mengelola dan menganalisis data akan dilakukan untuk kepentingan penarikan kesimpulan sebagai hasil akhir penelitian

HASIL PENELITIAN

Nama Desa Kayumerah berasal dari Bahasa Daerah Gorontalo yakni AYU-MELA. Dimana pada zaman dahulu bahwa masyarakat sering melihat sebatang pohon kayu yang sangat besar dan sering mengeluarkan cahaya berwarna merah yang menyala seperti api, sehingga dibuatlah kesepakatan untuk memberikan nama desa AYU-MELA atau dalam bahasa Indonesia yakni KAYUMERAH.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) dalam mengoptimalkan Pengelolaan Keuangan di Kantor Kelurahan Kayumerah Kecamatan Limboto Kabupaten Gorontalo. Adapun yang menjadi pokok masalah yang didapatkan melalui hasil observasi awal dan dituangkan dalam sub bagian bab identifikasi masalah adalah: 1) Dari sisi fisik, kapasitas jaringan internet yang tersedia di Kantor Kelurahan Kayumerah masih belum mampu mengikuti kebutuhan minimal kapasitas koneksinya; dan 2) Dari sisi non fisik (SDM), kualitas dan klasifikasi kompetensi yang dimiliki oleh pegawai di Kantor Kelurahan belum sesuai dengan kompetensinya. Kedua masalah yang ditemukan pada saat observasi awal tersebut telah dilakukan telaah dan penelitian yang dilakukan dengan cara mengumpulkan data melalui proses wawancara, observasi dan dokumentasi.

Optimal adalah kondisi tertinggi yang mungkin dilakukan seseorang/ sesuatu tanpa merusak unsur yang ada padanya. Kata optimal dipakai tanpa harus sampai mencapai batas akhir, melainkan batas akhir yang tertinggi atau terbaik. Optimalisasi adalah sebuah proses, cara dan perbuatan (aktivitas/kegiatan) untuk mencari solusi terbaik dalam beberapa masalah, dimana yang terbaik sesuai dengan kriteria tertentu. Optimalisasi adalah hasil yang dicapai sesuai dengan keinginan, jadi optimalisasi merupakan pencapaian hasil sesuai harapan secara efektif dan efisien" (Poerdwadarminta, 2014). Menurut (Nurrohman, 2017) Optimalisasi adalah upaya meningkatkan kinerja pada suatu unit kerja ataupun pribadi yang berkaitan dengan kepentingan umum, demi tercapainya kepuasan dan keberhasilan dari penyelenggaraan kegiatan tersebut. Menurut Winardi dalam Bayu (2017) Optimaslisai adalah ukuran yang menyebabkan tercapainya tujuan sedangkan jika dipandang dari sudut usaha, Optimalisasi adalah usaha memaksimalkan kegiatan sehingga mewujudkan keuntungan yang diinginkan atau dikehendaki.

Menurut (Mohammad Nurul Huda, 2018) Optimalisasi berasal dari kata optimal artinya terbaik atau tertinggi. Mengoptimalkan berarti menjadikan paling baik atau paling tinggi. Sedangkan optimalisasi adalah proses mengoptimalkan sesuatu, dengan kata lain proses menjadikan sesuatu menjadi paling baik atau paling tinggi. Jadi optimalisasi disini mempunyai arti berusaha secara optimal untuk hasil yang terbaik untuk mencapai dalam penerapan manajemen sarana dan prasarana pendidikan yang sesuai dengan harapan dan tujuan yang telah

direncanakan. Optimal erat kaitannya dengan kriteria untuk hasil yang diperoleh. Sebuah sekolah dapat dikatakan optimal apabila memperoleh hasil yang maksimal dengan kerugian yang minimal. Dari uraian tersebut diketahui bahwa optimalisasi hanya dapat diwujudkan apabila dalam perwujudannya secara efektif dan efisien. Dalam penyelenggaraan organisasi, senantiasa tujuan diarahkan untuk mencapai hasil secara efektif dan efisien agar optimal.

Berdasarkan hasil penelitian terkait dengan fungsi perencanaan keuangan didapatkan bahwa Aplikasi SIMDA telah mampu mengoptimalkan pengelolaan keuangan yang ada di Pemerintah Kelurahan Kayumerah. Namun jika berbicara pada komponen lain dluar aplikasi yang digunakan maka didapatkan permasalahan sebagaimana hasil pengamatan yang didapatkan selama ini. Dimana bahwa pada saat penggunaan aplikasi ini sering mengalami hambatan berkaitan dengan jaringan yang tidak normal. Pemerintah Kelurahan Kayumerah dalam jaringan internet memiliki kapasitas bandwith sebesar 50MB. Kapasitas ini jika dilihat dengan kasat mata tentunya besar jika hanya digunakan oleh aparat pemerintah kelurahan saja. Namun karena jaringan ini juga digunakan oleh masyarakat maka akses yang didapatkan tentunya akan berkurang karena pengguna yang banyak. Selain itu didapatkan juga bahwa setiap melakukan akses ke sistem Badan Keuangan Daerah juga akan sering mengalami gangguan karena bersamaan dengan OPD maupun pemerintah kelurahan lainnya yang sama-sama melakukan akses ke tujuan yang sama sehingga ini pula yang sering jadi masalah dalam mengoptimalkan SIMDA. Sehingga temuan pertama yang didapatkan yakni: 1) Dari sisi fisik, kapasitas jaringan internet yang tersedia di Kantor Kelurahan Kayumerah masih belum mampu mengikuti kebutuhan minimal kapasitas koneksinya; lebih pada masalah akses ke aplikasi tujuan yang ada di BKD.

Selanjutnya juga apliakasi SIMDA juga belum mampu dioptimalkan jika mengalami gangguan pada saat pemakaian. Hal ini disebabkan karena mungkin adanya *human erorr* yang perbaikannya harus menunggu operator lain yang berasal dari badan Keuangan Daerah. Pemerintah Kelurahan Kayumerah tidak serta merta mampu untuk memperbaik sisitem ini karena kemampuan aparat yang dimiliki tidak memiliki keahlian ataupun kapasitas pada permasalahan yang dihadapi. Sehingga hal ini juga membuktikan bahwa temuan masalah kedua yang didapatkan melalui hasil observasi yakni: 2) Dari sisi non fisik (SDM), kualitas dan klasifikasi kompetensi yang dimiliki oleh pegawai di Kantor Kelurahan belum sesuai dengan kompetensinya.

Selanjutnya terkait melihat sejauh mana pengelolaan keuangan di Kantor Kelurahan Kayumerah Kecamatan Limboto dengan menggunakan SIMDA penulis menggunakan rujukan teori yang dikemukakan oleh Z Nurdiansyah dan Rahman (2019:74) yang menyatakan fungsi-fungsi pengelolaan keuangan, yaitu: 1) Perencanaan Keuangan dan Anggaran (*Budgeting*), 2) Pengendalian (*Controling*), 3) Pemeriksaan (*Auditing*), dan 4) Pelaporan (*Reporting*). Kemudian oleh peneliti, rujukan atas teori tersebut dijadikan dalam bentuk pertanyaan yang diajukan kepada informan dalam penelitian ini.

1) Perencanaan Keuangan dan Anggaran (*Budgeting*)

Segala kegiatan perusahaan yang berkaitan dengan penggunaan anggaran dana perusahaan yang digunakan unttuk segala aktivitas dan kepentingan perusahaan. Dengan perencanaan dan pertimbangan yang matang menaksimalkan keuntungan dan meminimalisasi anggaran yang sia-sia tanpa hasil. Perencanaan keuangan atau sering dikenal dengan financial planning merupakan suatu strategi untuk menyusun dana pribadi maupun bisnis dengan implementasi terencana. Hal ini

penting dilakukan dan harus dibuat secara jelas konsepnya demi memperoleh tujuan dalam jangka waktu tertentu sebagai langkah pengelolaan keuangan. Sebenarnya proses pengelolaan keuangan ini memiliki tujuan untuk menyederhanakan berbagai arus keluar masuknya uang serta aset dalam rumah tangga.

Penyederhanaan tersebut dimaksudkan supaya bisa memiliki batasan jelas dalam setiap tindakan demi mencapai tujuan awal di segi keuangan. Financial planning pada dasarnya dapat dibagi dalam berbagai rencana, baik jangka pendek, menengah maupun panjang. Rencana jangka panjang dari perencanaan keuangan sebenarnya harus dilakukan oleh setiap manusia tanpa ada batasan. Kita bisa mengatur keuangan sedemikian rupa agar tercapai kestabilan antara pemasukan dengan pengeluaran tanpa terjadi kekurangan. Secara sederhana perencanaan keuangan tidak hanya mengacu pada kelompok ataupun pemilik usaha. Manajemen keuangan yang baik juga harus dikuasai sendiri dan individu lainnya demi kepentingan sendiri. Selain itu bagi ibu rumah tangga yang bertugas nanti juga dapat melakukan perencanaan untuk mengelola kas keluarga.

Berdasarkan hasil penelitian yang didapatkan melalui proses wawancara terkait dengan maksimalnya kegiatan perencanaan keuangan dan penganggaran dengan menggunakan SIMDA, bahwa dengan menggunakan aplikasi SIMDA ini dapat memudahkan Pemerintah Kelurahan untuk melakukan perencanaan keuangan serta penganggarannya. Hal ini dikarenakan dalam sistem tersebut telah tersedia item-item yang dibutuhkan dalam penyusunan perencanaan keuangan serta anggaran yang akan dilaksanakan. Selanjutnya terkait dengan mudahnya melakukan kegiatan perencanaan keuangan dan penganggaran dengan menggunakan SIMDA dapat disimpulkan bahwa dengan menggunakan aplikasi SIMDA, sangat memudahkan bagi aparat pemerintah Kelurahan Kayumerah dalam memudahkan Menyusun perencanaan keuangan serta anggaran. Karena dengan aplikasi SIMDA tersebut aparat tidak direpotkan lagi dengan membuat table ataupun gambar yang terkait dengan perencanaan keuangan dan anggaran.

2) Pengendalian (*Controling*)

Berhubungan dengan tindak pengawasan dalam segala aktivitas dalam manajemen keuangan, baik dalam penyalurannya maupun pada pembukuannya yang untuk selanjutnya dilakukan evaluasi keuangan yang bisa dijadikan acuan untuk melaksanakan kegiatan perusahaan selanjutnya. Pengendalian adalah proses untuk mengukur kinerja dan memastikan bahwa tindakan yang dilakukan berhasil mencapai tujuan yang telah ditentukan. Pengendalian membantu memastikan bahwa setiap individu maupun kelompok bertindak sesuai dengan rencana jangka panjang maupun jangka pendek organisasi. Pengendalian juga membantu memelihara kepatuhan terhadap peraturan dan kebijakan organisasi

Berdasarkan hasil penelitian yang didapatkan melalui proses wawancara terkait dengan kemudahan dalam pengendalian pengelolaan keuangan dalam menggunakan SIMDA, bahwa kegiatan pengelolaan keuangan lebih mudah dikendalaikan dengan menggunakan SIMDA. Hal ini dapat dilihat bahwa Pemerintah Kelurahan Kayumerah lebih memudahkan dalam mengendalikan pengeluaran dana yang sesuai dengan item yang telah ditetapkan dalam perencanaan yang telah dilakukan. Selain itu setiap anggaran yang ditetapkan akan dikeluarkan sesuai dengan besaran yang ditetapkan pula serta mampu mengendalikan maka anggaran prioritas dan non-prioritas. Selanjutnya terkait dengan dengan proses pengendalian yang dilakukan dengan menggunakan SIMDA, bahwa proses pengendalian yang dilakukan dengan menggunakan SIMDA adalah terjadinya pengendalian

dalam proses administrasi keuangan yang menyangkut dengan masukan, proses dan luaran. Selain itu dengan adanya pengendalian dalam pengelolaan keuangan dengan menggunakan SIMDA ini lebih terbangun tata Kelola keuangan yang baik dan juga dari sisi lain akan lebih efektif dana efisien dalam pengopersiannya.

3) Pemeriksaan (*Auditing*)

Segala pemeriksaan internal yang dilakukan demi segala bentuk kegiatan yang berhubungan dengan manajemen keuangan memang telah sesuai dengan kaidah standar akuntansi dan tidak terjadi penyimpangan. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, mengolah data dan atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang undangan perpajakan (UU KUP pasal 25).

Berdasarkan hasil penelitian yang didapatkan melalui proses wawancara yang telah dilakukan kepada para informan terkait dengan proses pemeriksaan yang dilakukan dengan adanya SIMDA, bahwa proses pemeriksaan dengan hadirnya SIMDA ini lebih mudah. Dimana dalam pemeriksaan yang dilakukan akan dilaksanakan oleh sebuah tim yang telah ditunjuk Pemda. Tim ini akan melakukan verifikasi secara langsung melalui sistem yang ada tanpa harus turun secara langsung ke Kantor Pemerintah Kelurahan Kayumerah. Namun jika tim menganggap ada data lain yang perlu ditambahakan guna meyakinkan kevalidan data yang ada, maka tim tersebut akan secara langsung mendatangi Kantor Kelurahan. Selanjutnya terkait dengan kemudahan dalam proses pemeriksanaan dengan menggunakan SIMDA, bahwa dengan adanya aplikasi SIMDA ini, proses pemeriksaaan atas pengelolaan keuangan akan lebih mudah. Karena dengan adanya sistem yang telah terbangun dengan baik hingga dapat meminimalisir setiap kesalahan dalam pengelolaan keuangan.

4) Pelaporan (*Reporting*)

Dengan adanya manajemen keuangan, maka setiap tahunnya akan ada pelaporan keuangan yang berguna untuk menganalisis rasio laporan laba dan rugi perusahaan. *Reporting* (pelaporan) menurut Luther M. Gullick dalam bukunya *Papers on the Science of Administration* merupakan salah satu fungsi manajemen berupa penyampaian perkembangan atau hasil kegiatan atau pemberian keterangan mengenai segala hal yang bertalian dengan tugas dan fungsi-fungsi kepada pejabat yang lebih tinggi baik secara lisan maupun tertulis sehingga dalam penerimaan laporan dapat memperoleh gambaran bagaimana pelaksanaan tugas orang yang member laporan. Selain itu, pelaporan merupakan catatan yg memberikan informasi tentang kegiatan tertentu dan hasilnya disampaikan ke pihak yang berwenang atau berkaitan dengan kegiatan tertentu (Siagian, 2003). Pelaporan merupakan suatu kegiatan yang dilakukan bawahan untuk menyampaikan hal-hal yang berhubungan dengan hasil pekerjaan yang telah dilakukan selama satu periode tertentu. Pelaporan dilakukan kepada atasan kepada siapa bawahan tersebut bertanggung jawab. Pelaporan adalah aktivitas yang berlawanan arah dari pengawasan, Jika pengawasan dilakukan oleh pihak atasan untuk mengetahui semua hal yang menyangkut pelaksanaan kerja bawahan, maka pelaporan merupakan jawaban dari kegiatan pengawasan tersebut.

Berdasarkan hasil penelitian yang didapatkan melalui proses wawancara yang dilakukan kepada para informan terkait dengan proses pelaporan yang dilakukan dengan adanya aplikasi SIMDA, bahwa dengan adanya SIMDA ini lebih memudahkan dalam melakukan pelaporan. Dimana pelaporan yang ada terkait dengan realisasi anggaran yang digunakan dalam satu periode semuanya telah terinput dalam aplikasi SIMDA tersebut sehingga tim pemeriksa secara langsung akan membuka sistem yang dikelola oleh pemerintah Kelurahan Kayumerah dan memeriksanya. Namun jika ada temuan yang didapatkan maka tim pemeriksa akan melakukan verifikasi lapangan guna mencocokan antara data yang ada dalam aplikasi dengan catatan manual yang dimiliki oleh Pemerintah Kelurahan Kayumerah. Selanjutnya terkait dengan kemudahan ataupun kesulitan pelaporan dengan adanya aplikasi SIMDA, bahwa dengan adanya aplikasi SIMDA ini Pemerintah Kelurahan Kayumerah lebih dimudahkan dalam proses pelaporan. Dimana pelaporan yang ada cukup melalui aplikasi tersebut yang nantinya tim verifikasi yang dibentuk oleh Badan Keuangan Pemerintah daerah Kabupaten Gorontalo akan melakukan pemeriksaan melalui sistem yang ada dan kemudian melakukan verifikasi lapangan jika dibutuhkan bukti-bukti terkait dengan pengelolaan keuangan.

PENUTUP

Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada bab sebelumnya terkait dengan Optimalisasi Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) dalam Pengelolaan Keuangan di Kantor Kelurahan Kayumerah Kecamatan Limboto Kabupaten Gorontalo didapatkan belum secara optimal dapat digunakan. Dimana jika pada saat melakukan akses sering terhambat pada pemakaian jaringan internet yang bersamaan digunakan oleh masyarakat. Selain itu pada saat melakukan akses ke Badan Keuangan Daerah juga mengalami hambatan karena bersamaan dengan penggunaan dari OPD maupun dari Pemerintah Kelurahan/Desa yang lain. Hal lain juga terkait dengan sumber daya manusia yang dimiliki oleh Pemerintah Kelurahan Kayumerah yang belum memiliki skil atau kemampuan memperbaiki jika sistem mengalami *human error*

Kemudian terkait dengan pengelolaan keuangan dengan menggunakan SIMDA telah baik, dimana jika merujuk pada kajian terkait dengan fungsi-fungsi pengelolaan keuangan, yaitu: 1) Perencanaan Keuangan dan Anggaran (*Budgeting*), 2) Pengendalian (*Controling*), 3) Pemeriksaan (*Auditing*), dan 4) Pelaporan (*Reporting*) telah berjalan dengan baik. Namun demikian aplikasi ini pada faktor lain dapat dinilai belum optimal mampu dimaksimalkan.

Saran

Berdasarkan hasil kesimpulan diatas terkait penelitian ini, maka dapat diberikan saran sebagai berikut:

a. Pemerintah harus melakukan pembagian kapasitas jaringan internet yang digunakan dengan masyarakat sehingga pada saat menggunakan internet tidak akan terganggu;
b. Pemerintah Kelurahan Kayumerah harus membuat pelatihan bagi aparat untuk mampu memperbaiki secara madiri jika terjadi *human error*.

DAFTAR PUSTAKA

Anwar, Mokhamad. 2019. Dasar-dasar Manajemen Keuangan Perusahaan. Edisi 1, Jakarta: PRENADAMEDIA GROUP.

Armereo, C., Marzuki, A., & Seto, A. A. (2020). Manajemen Keuangan. Nusa Litera Inspirasi.

Asep Deni, Ari Riswanto (2019). Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan KPT Mahasiswa

Irfani & Agus, S. (2020). Manajemen Keuangan Dan Bisnis (Bernadine (ed.)). PT. GRAMEDIA PUSTAKA UTAMA. www.gpu.id

Irmayani Natsir, Ansyarif Khalid, dan Samsul Rizal. 2017. Analisis

Penerapan Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) Keuangan pada Pemerintah Daerah Kabupaten Gowa

Jatmiko, Dadang Prasetyo. 2017. Pengantar Manajemen Keuangan. Yogyakarta: Diandara Creatif. dalam https://books.google.co.id/books?id=rnwtDwAAQBAJ&printsec=frontcover&hl=id#v=onepage&q=penggalangan%20dana&f=false.

Lumintang D. Natalia, 2015. Analisis Penerapan Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) Keuangan pada BPK-BMD Pemerintah kota Manado

Mohammad Nurul Huda. 2018. Optimalisasi Sarana Dan Prasarana Dalam Meningkatkan Prestasi Belajar Siswa. Jurnal Manajemen Pendidikan Islam

Nurdiansyah, Haris dan Robbi Saepul Rahman, 2019, Pengantar Manajemen, Diandra Kreatif, Yogyakarta.

Nurrohman, B. 2017. Optimalisasi Pelayanan E-KTP guna Meningkatkan Validitas data Kependudukan di Kecamatan Majasari Kabupaten Pandeglang. Jurnal 10 No. 6. Banten STISIP Banten Raya Pandeglang.

Purba et al. 2021. The Effect of Cash Turnover and Accounts Receivable Turnover on Return On Asset. Indonesian College of Economics. STEI. Jakarta

Purnomo, A. (2015,). Sistem Administrasi Keuangan Sekolah. Retrieved from https://eprints.ums.ac.id

Poerwadarminta, W.J.S. 2014. Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jakarta: Balai Pustaka.

Saputro, N. B. (2020). Perancangan Sistem Informasi Administrasi Siswa Pada SDIT Perjuangan Depok. INTEGER: Journal of Information Technology, 5(1).

Siagian, Sondang P. 2003. Teori & praktek kepemimpinan. Jakarta: Rineka Cipta.

Sugiyono, 2013. Memahami Penelitian Kualitatif, Bandung: CV. Alfabeta

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang pemerintah daerah

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah

Wijaya, David (2017). “Manajemen Keuangan Konsep dan Penerapannya”. Jakarta: PT. Grasindo.